

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memasuki era reformasi yang di tandai dengan bergantinya kekuasaan pemerintahan dari rezim orde baru ke orde reformasi pada tahun 1998, mengawali periode pemerintahannya dengan berbagai masalah yang melanda, mulai dari krisis multi dimensi yang melanda seluruh Asia Tenggara, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta melaksanakan agenda Nasional yang sangat penting yaitu pembangunan nasional yang adil dan merata dalam segala bidang di seluruh wilayah Indonesia. Tuntutan reformasi lainnya yang menarik perhatian adalah tentang desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah. Maka secara langsung mengubah ruang lingkup kewenangan pemerintah di Indonesia, pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga atau daerahnya sendiri.

Berbagai perubahan telah dilakukan di dalam berbagai bidang aspek ketatanegaraan, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menjadi peluang yang besar bagi perubahan yang mendasar dalam proses menuju negara demokratis yang dicita-citakan. Sebagai dasar hukum atas hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-undang 1945 mengakibatkan perubahan terjadi di segala aspek ketatanegaraan.

Wilayah negara kesatuan RI terbagi atas daerah provinsi, dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten/kota, kecamatan dan Desa sampai kelurahan. Daerah-daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah

Republik Indonesia agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Desa sebagai unit pemerintahan daerah yang paling bawah merupakan instansi yang secara langsung melayani masyarakat yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala desa sebagai aparat pemerintah selaku abdi negara dan masyarakat, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan umum. Pemerintah desa sebagai pemerintah terendah, merupakan sebuah wadah kerjasama Kepala Desa dan perangkatnya untuk melaksanakan urusan dekonsentrasi, desentralisasi, tugas bantuan dan tugas-tugas pokok sebagaimana sesuai dengan rencana pembangunan desa. Dalam proses pembangunan disamping mengejar pencapaian dalam bentuk fisik, juga mengubah sikap mental dan pola pikir masyarakat agar lebih maju, kreatif, dan dinamis. Hal ini tidak mungkin tercapai apabila tidak disertai dengan sikap keterbukaan masyarakat untuk melaksanakan ide-ide dan gagasan dari pembangunan disertai peran serta masyarakat.

Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Idelanya, program-program pembangunan pedesaan bisa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan di wilayah setempat. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan dalam pasal 78 ayat (1) bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana

Desa, pembangunan infrastruktur desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa menurut ketentuan umum pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Posisi pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala Desa selaku pemimpin di desa, pembina, pengayom, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini seorang pemimpin sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan desa dan bidang pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Di dalam dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan desa. Kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang diketahui

pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakkan peraturan dan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pembangunan infrastruktur Desa ditujukan pada Desa Batapah kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. pembangunan desa difokuskan dalam pembangunan fisik atau pembangunan general yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes).

Bertitik tolak dari tinjauan yang dilakukan pada Kepemimpinan Transformasi Kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa Batapah, peneliti menemukan beberapa fenomena yang menunjukkan beberapa perubahan kemajuan yang cukup signifikan terhadap pembangunan fisik di Desa Batapah. Adapun fenomena pembaharuan yang dimaksud dikaitkan dengan implementasi indikator peran kepemimpinan dalam pembangunan infrastruktur Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya fenomena Kepala Desa memotivasi warga dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dalam hal ini Kepala desa memberikan dorongan kepada warga desanya agar ikut serta dalam membangun desa, seperti memberikan arahan berupa dorongan semangat kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.
2. Adanya fenomena Kepala Desa memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa sumur bor, genset dan juga bahan-bahan pembuatan MCK (mandi,cuci kakus) .
3. Adanya fenomena Kepala Desa mengarahkan atau menggerakkan masyarakat bersama-sama untuk melakukan perbaikan terhadap desanya, yaitu dengan melakukan gotong royong, pembuatan drainase Desa , membersihkan parit.

Desa Batapah adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. Kondisi partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan dan untuk perkembangan desa sudah tergolong aktif. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan transformasi kepala desa dalam mengurus dan menata pemerintahan desa serta mampu mempengaruhi para bawahannya dan mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan infrastruktur desa, mempengaruhi masyarakat ikut serta dalam mendukung dan mendorong keberhasilan dalam pembangunan desa. Faktor yang membuat aktifnya keterlibatan masyarakat yaitu dengan kemampuan seorang kepala desa dalam memimpin masyarakat serta dengan adanya penyelenggaraan program yang sangat efektif dibutuhkan masyarakat sehingga itu menjadi penilaian warga desa untuk ikut serta terlibat dalam membangun desa secara bersama. Hal inilah yang menjadi pencapaian seorang pemimpin yang bukan lain adalah kepala desa itu sendiri serta dibantu oleh jajaran aparatur desa dalam mendukung dan pelaksana pembangunan Desa.

Seorang kepala desa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan motivasi masyarakat desa, seyogianya mampu menjalankan kepemimpinannya secara fokus atau dengan kata lain, kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang Kepala Desa harus dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga diharapkan memberikan efek yang nyata serta dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti dengan judul skripsi “ Kepemimpinan Transformasi Kepala Desa

dalam pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Bagaimana Kepemimpinan Transformasi kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur desa di Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana kepemimpinan Transformasi kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui seperti apa kepemimpinan Transformasi Kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Batapah Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas”

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Akademis (Teoritis)

1) Manfaat penelitian bagi penulis adalah diharapkan penelitian itu dapat menambah pengetahuan ilmiah dan pengalaman bagi peneliti, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran atau wawasan keilmuan yang dikhususkan sosiologi organisasi dan sosiologi desa kota yang dikhususkan dalam kepemimpinan transformasi kepala desa dalam pembangunan Infrastruktur desa dan partisipasi masyarakat.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Kepala Desa atau instansi pemerintahan desa maupun masyarakat luas terkait bagaimana kepemimpinan transformasi kepala desa dalam pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Batapah.